

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asfara, N., 2025, *Analisis Tindak Pidana Korupsi pada Kasus PT Timah (Persero) Tbk*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Asshiddiqie, J., 2010, *Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, R., 2012, *Reformasi Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Indonesia Corruption Watch, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024*, IC1, Jakarta.
- Balai Pustaka, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta.
- BPK RI, 2017, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, BPK RI, Jakarta.
- Djaja, E., 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ganarsih, Y., 2012, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Jakarta..
- Hadjon, P.M., 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, A., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, A., 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, A., 2018, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, A., 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y., 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y., 2012, *Pembahasan Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, E.O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

- Hornby, A.S., 2015, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford.
- H Sunaryati Hartono, 1997, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Indonesia Corruption Watch, 2023, *Tren Korupsi Sektor Sumber Daya Alam 2020–2023*, IC1, Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024*, IC1, Jakarta.
- Kementerian ESDM RI, 2021, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minerba*, Jakarta..
- KPK, 2014, *Kajian Tata Kelola Minerba*, Jakarta.
- KPK, 2020, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Jakarta.
- KPPU RI, 2018, *Kajian Struktur Pasar dan Tata Niaga Komoditas Strategis*, KPPU, Jakarta.
- Mulyadi, L., 2020, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi & Barda N. Arief, 2019, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, 1., 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS., 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, B., 2021, *Hukum Tata Niaga Komoditas di Indonesia: Teori dan Praktik*, Penerbit Mitra Hukum, Jakarta.
- Soekanto, S. & Mamudji, S., 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hamzah, A., 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Idiyalati, 2018, *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Iijaya, I.M., 2022, *Konstitusionalitas Pengaturan Tata Niaga*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

B. Jurnal

Agustina, S. (2019). "Analisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 8, No.2

Ambarita, Karina Dli Adji Toruan. (2020) "Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1,

Ananda, Febrian dan Lilik Mulyadi. (2018) "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1

Arief, H. (2020). Korupsi dalam tata niaga: Analisis yuridis dan sosiologis. *Jurnal Antikorupsi*, Vol.5, No. 3.

Efendi, J. (2014). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan bebas perkara korupsi demi tegaknya keadilan. *Jurnal Yudisial*, Vol.7, No.3.

Hamdan, M. (2012). Alat bukti dalam persidangan perkara pidana korupsi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.19, No.1

Hiariej, E. O. S. (2019). Teori pembuktian dan relevansinya dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.26, No.1.

Husein, Y. (2007). Korupsi dan pencucian uang: Modus operandi dan kerugian negara. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.4, No.2.

Hutauruk, R. H. (2013). Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.9, No.1

Kristanto, M. B. (2015). Urgensi pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.4, No.3.

Kusuma, A. D. (2020). Peran negara dalam pengaturan tata niaga komoditas strategis.

- Mahmud, A. I., & Nursal, M. (2019). Problematika pembuktian tindak pidana korupsi. *Jurnal Al-'Adl*, Vol.12, No.1,
- Manurung, J. (2018). Pertanggungja laban korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No.4
- Pratama, D. (2019). Hierarki peraturan dalam tata niaga komoditas. *Indonesian Trade Lal RevieI*, Vol.5, No.2,
- Transparency International. (2024). *Corruption perception index 2024*. Transparency International Secretariat.
- UPNVJ. (2023). Artikel yuridis (Vol. 10 No. 2). *Jurnal Yuridis*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/7358/2806>

C. Penelitian Terdahulu

- Asfara, N., 2025, Analisis Tindak Pidana Korupsi pada Kasus PT Timah (Persero) Tbk yang Merugikan Perekonomian dan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Rudi Alamsyah, Analisis Fraud Hexagon (2025) dalam Mendeteksi Indikasi Korupsi: Studi Kasus pada PT Timah Tbk, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Putra, Sukabumi.
- Ildiyalati, (2018) Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal di Bangka (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor: 57/Pid.B/2015/PN.SGL), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas SriIijaya, Indralaya,

D. Peraturan perundang-undangan

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaporan dan Verifikasi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri*

Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Timah..

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan..*

Republik Indonesia. (1971). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman..*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.*

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..*

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.*

E. Putusan Pengadilan

Putusan	Pengadilan	Tinggi	DKI	Jakarta	Nomor
68/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.JKT.PST.					

F. Website

Mahkamah Konstitusi RI, 2025, “KPK: Kerugian Negara Meningkatkan Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi”, *Berita MK*, diakses dari: <https://111.mkri.id/>